



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

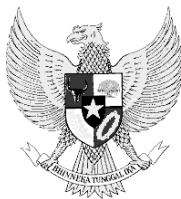
NOMOR : HK/55A/TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2017**



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR HK /55.A / TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengukuran dan Peningkatan Kinerja serta lebih meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Indikator Kinerja Utama Pemerintah;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten ditetapkan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

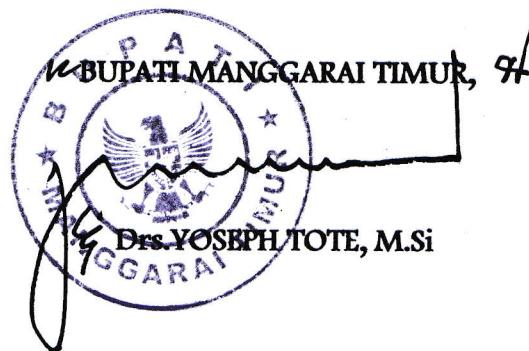
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 104);

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Manggarai Timur
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong,
Pada tanggal 23-1-2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/55.A/TAHUN 2017

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KAB. MANGGARAI TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 - 2019
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

VISI 2014 - 2019

: Terwujudnya Manggarai Timur yang lebih Sejahtera, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Sehat, Ramah Lingkungan, Demokratis, Bermartabat Dengan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia Menuju Masyarakat

Misi I 2014 - 2019

yang Lebih Mandiri yang direkat oleh Budaya Loka

1. Membangun SDM Kabupaten Manggarai Timur yang Produktif dan Berdaya Saing

No.	Sasaran Strategis	Indikator Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Formula Pengukuran	Unit terkait	Sumber Data	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengkatnya Akses Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata Kepada Masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf	%	Jumlah Angka Melek Huruf di Manggarai Timur Selama Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Angka Melek Huruf}}{\text{Jumlah Angka Buta Huruf}} \times 100$	P & K	GFK Kabupaten	APBD, APBN
2.	Mengkatnya Mutu Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PTK Yang S - 1	Orang	Jumlah Guru yang Berpendidikan Sarjana Kondisi	$\frac{\text{Jumlah Guru yang Berpendidikan Sarjana}}{\text{Jumlah Seluruh Guru yang ada}} \times 100$	P & K	P & K	APBD, APBN
3.	Mengkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olah raga	Jumlah Kompetisi yang Diselenggarakan	Kali	Jumlah Sarana, Organisasi dan Kompetisi Selama satu Tahun Tertentu	$\frac{\text{Jumlah Sarana, Organisasi dan kompetensi dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Sarana, Organisasi dan Kopetensi yang diwajibkan}} \times 100$		Dinas PKO	APBD, APBN
4.	Mengkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan		Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu (dapat pula di ukur berdasarkan jenis kelamin)	$\frac{\text{Jumlah kasus kematian dalam kelompok usia kematian}}{\text{Jumlah seluruh kasus kematian}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD
5.	Menurunnya Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	Jumlah bayi mati/lahir hidup	Banyaknya kematian bayi kurang dari satu tahun setiap 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun terakhir	$\frac{\text{Banyaknya Kematian Bayi kurang dari satu tahun suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah bayi lahir Hidup pada wilayah dan tahun yang sama}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD
		Angka kematian balita per 1.000 KH	Jumlah balita mati/lahir hidup	banyaknya kematian balita kurang dari lima tahun setiap 1000 kelahiran pada 1 tahun terakhir	$\frac{\text{Banyaknya kematian Balita (0-59 bulan) pada suatu wilayah dalam kurun 1 tahun}}{\text{Jumlah Bayi Lahir Hidup pada wilayah dan tahun yang sama}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD, APBN
		Angka kematian ibu per 100.000 KH	Jumlah ibu mati/lahir hidup	Banyaknya wanita yang meninggal dengan satu penyebab kematian terkait dgn gangguan kehamilan/ penanganannya selama kehamilan dan dlm masa nifas (42 hari post partum) setiap 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Banyaknya Wanita yang meninggal dengan satu penyebab kematian terkait dgn gangguan kehamilan/penanganannya selama kehamilan dan dalam masa nifas (42 hari post partum)}}{\text{Jumlah bayi lahir hidup tanpa melihat usia dan lokasi}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD, APBN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Formula Pengukuran	Unit Terkait	Sumber Data	Sumber Dana
6.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Melalui Promosi, Pemberdayaan dan Penyehatan Lingkungan	Persentasi Desa Siaga Aktif dalam Pemberantasan Penyakit	%	Proporsi Desa Siaga Aktif sebagai wujud Partisipasi Masyarakat Desa dalam rangka penanganan masalah kesehatan di wilayah Desa /Kelurahan dari seluruh desa siaga yang ada dan respon cepat dalam pelayanan guna penanggulangan kejadian luar biasa di desa/kelurahan secara dini dalam rangka antisipasi penyebaran penyakit menular masnyarakat	$\frac{\text{Jumlah Desa siaga yang aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang ada pada waktu tertentu}} \times 100$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
7.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Persentase Peserta KB Aktif	%	Cakupan Peserta KB aktif dari seluruh jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	$\frac{\text{Jumlah Pesertan KB Aktif yang ada}}{\text{Jumlah Seluruh peserta KB yang ada}} \times 100$	Dinas P2KBP3A	Dinas P2KBP3A	APBD
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Jumlah penyelesaian kasus perlindungan perempuan dan kekerasan terhadap anak	$\frac{\text{Jumlah kasus perlindungan kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus perlindungan kekerasan pada perempuan dan anak yang ada}} \times 100$	Dinas P2KBP3A	Dinas P2KBP3A	APBD
9.	Meningkatnya Pemahaman Anggota Keluarga Terhadap Bahaya Narkoba	Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	Media	Jumlah media yang mensosialisasikan bahaya Narkoba terhadap masyarakat dan keluarga	$\frac{\text{Jumlah Media yang berperan Mensosialisasi bahaya Narkoba}}{\text{Jumlah seluruh media yang berperan mensosialisasikan bahaya narkoba}} \times 100$	Badan Narkotika Kabupaten	Badan Narkotika Kabupaten	APBD
10.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Persentase PMKS Skala Kab./Kota yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya	%	Proses peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka penanganan masalah-masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat terhadap KK miskin	$\frac{\text{Prestasi peningkatan koordinasi dan kerja sama Intas sektor penanganan masalah-masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial terhadap KK miskin}}{\text{Banyaknya masalah-masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat}} \times 100$	Dinas Sosial		APBD
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	Kelompok	Jumlah kelompok yang dibina lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) selama satu tahun	$\frac{\text{Jumlah kelompok yang dibina LPM}}{\text{Banyaknya jumlah kelompok yang harus dibina}} \times 100$	Dinas PMD	Dinas PMD	APBD

Misi II : Membuka Isolasi Daerah dan Membangun Infrastruktur Secara Merata

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan		Formula Pengukuran	Unit terkait	Sumber Data	Sumber Dana
12	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah panjang jaringan jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh panjang jaringan jalan}} \times 100$	Dinas PUPR	Dinas PUPR	APBD
13.	Terwujudnya Infrastruktur Air Bersih, Drainase dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	Presentase rumah tinggal bersanitasi warga dalam kurun waktu tertentu	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal dan air baku untuk kebutuhan warga sehari-hari}}{\text{Banyaknya kebutuhan rumah tinggal dan air baku untuk kebutuhan warga sehari-hari}} \times 100$	Dinas PUPR	Dinas PUPR	APBD, APBN
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal warga sehari-hari	%	Presentase air baku dalam kebutuhan pokok minimal warga sehari-hari	Banyaknya kebutuhan rumah tinggal dan air baku untuk kebutuhan warga sehari-hari	Dinas PUPR	Dinas PUPR	

14.	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal	Rasio Panjang Jaringan Irigasi	%	Rasio jaringan irigasi dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	Jumlah jaringan irigasi dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat $\times 100$ Banyaknya kebutuhan jaringan irigasi dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	Dinas PUPR	Dinas PUPR	APBD, APBN
15.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	%	Presentase terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah $\times 100$	Dinas PUPR	Dinas PUPR	APBD
		Mengurangi luasan kawasan kumuh pada desa dan perkotaan	m2	Luas kawasan pengurangan kawasan kumuh pada desa dan perkotaan	luasnya kawasan kumuh yang terkurangi	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
16.	Seluruh Kawasan Dapat Diakses Oleh Sarana Transportasi Publik yang Nyaman dan Lancar	Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu	Orang	Jumlah arus penumpang yang menggunakan transportasi Publik	Jumlah Arus penumpang yang menggunakan trasportasi publik $\times 100$ Banyaknya arus penumpang yang ada selama satu tahun	DISHUB	DISHUB	APBD
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan	%	Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang memiliki jaringan jalan	Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang memiliki jaringan jalan $\times 100$ banyaknya akutan umum yang melayani wilayah yang memiliki jaringan jalan	DISHUB	DISHUB	
17	Manggarai Timur Menjadi Kabupaten yang Hijau, yang Bersih, Sehat dan Ramah Lingkungan	Persentase penanganan sampah	%	Jumlah penanganan sampah yang dilaksanakan selama setahun	Jumlah penangan sampah yang dilaksanakan selama setahun $\times 100$ banyaknya jumlah sampah selama setahun	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
		Pemantauan status mutu air	%	Jumlah kegiatan pemantauan status mutu air selama setahun	Jumlah pemantauan status mutu air $\times 100$ banyaknya sumber air yang harus dipatau	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
		Rasio ruang terbuka hijau	%	jumlah ruang terbuka hijau yang telah dibuka	Jumlah ruang terbuka hijau yang telah dibuka $\times 100$ Jumlah Ruang terbuka hijau yang harus dibuka	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
18.	Tertanggulanginya Bencana Secara Dini dan Komprehensif	Prosentase Pengurangan Resiko Terhadap Bencana	%	Jumlah pengurangan resiko terhadap bencana selama satu tahun	Jumlah tindakan pengurangan resiko selama setahun $\times 100$ Banyaknya kawasan potensi bencana	BPBD	BPBD	APBD
		Persentase penanganan pasca bencana	%	Jumlah penganganan pasca bencana selama satu tahun	Jumlah penanganan pasca bencana selama satu tahun $\times 100$ banyaknya bencana selama satu tahun	BPBD	BPBD	APBD
19.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW (Dokumen Tata Ruang)	%	Jumlah ketaatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terhadap RTRW (Dokumen tata ruang)	Jumlah ketaatan terhadap tata ruang yang ada $\times 100$ banyaknya aktivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	BPBD	BPBD	APBD

Misi III : Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Optimalisasi Keunggulan Daerah

20.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)	Produktivitas komoditi tanaman pangan	Ton/Ha	Jumlah produksi komoditi tanaman pangan selama satu tahun	Jumlah luas lahan pertanian yang tersedia $\times 100$ Jumlah luas lahan komoditi tanaman pangan yang dibutuhkan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	APBD, APBN
		luas areal tanaman Perkebunan yang ditingkatkan	Ha	Luas area tanaman perkebunan unggulan daerah yang ditingkatkan	Luas areal tanaman perkebunan yang ditingkatkan $\times 100$ Luas area tanaman perkebunan yang tersedia	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	APBD, APBN
		Jumlah produksi perikanan	Ton	Jumlah produksi perikanan selama satu tahun	Jumlah produksi perikanan selama satu tahun $\times 100$ Jumlah produksi perikanan yang ditargetkan selama satu tahun	DKP	DKP	APBD
		Jumlah Populasi Ternak	Ekor	jumlah populasi ternak selama satu tahun	Jumlah Populasi ternak yang ada $\times 100$ Jumlah populasi ternak yang ditargetkan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	APBD

21.	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)	Nilai Tukar Petani	Nilai	Nilai tukar petani	Nilai Tukar Petani x 100 Nilai Tukar petani yang layak	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	APBN
22.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	Jumlah cadangan pangan dan ketersediaan pangan dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah cadangan pangan dan ketersediaan pangan dalam kurun waktu satu tahun x 100 Banyaknya Cadangan pangan dan ketersediaan pangan yang harus disiapkan dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Pangan	Dinas Pangan	APBD
23.	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisata dalam satu tahun	Jumlah kunjungan wisatawan dalam setahun x 100 Banyaknya kunjungan wisatawan yg ditargetkan	Dinas PKO	Dinas PKO	APBD
24.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan x 100 Banyaknya UMKM yang seharusnya mendapat penghasilan	DISPERKOP UKM	DISPERKOP UKM	APBD
		Jumlah koperasi aktif	Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif x 100 Banyaknya Koperasi yang ada	DISPERKOP UKM	DISPERKOP UKM	APBD
25.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi	Jumlah investasi yang masuk	Rupiah	Jumlah investasi yang aktif selama satu tahun	Jumlah Investasi yang masuk x 100 Jumlah investasi yang ditargetkan	Dinas PMPTSP	Dinas PMPTSP	APBD
26.	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	%	Rasio tenaga kerja yang terserap dan seluruh tenaga kerja yang ada selama satu tahun	Rasio Tenaga kerja yang terserap x 100 Banyaknya tenaga kerja yang ada	DISNAKERTRAS	DISNAKERTRAS	APBD

Misi IV : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel yang Berkarakter Melayani

27.	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Ada	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun	Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan yang ada x 100 Banyaknya dokumen perencanaan program dan kegiatan yang dibutuhkan	BP3	BP3	APBD
28.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase OPD yang Menyampaikan Dokumen LAKIP yang Terintegrasi dan Tepat Waktu	%	Nilai LAKIP	Nilai LAKIP diharapkan 85 - 100 (AA)	Seluruh OPD	Seluruh OPD	APBD
29.	Meningkatnya Kapasitas Pembinaan Pembangunan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rupiah	Jumlah pendapatan asli daerah yang ada	Jumlah Pendapatan asli daerah yang ada x100 Jumlah pendapatan asli daerah yg ditargetkan	Seluruh OPD	Seluruh OPD	APBD

Borong, 23 Januari 2017
BUPATI MANGGARAI TIMUR 



